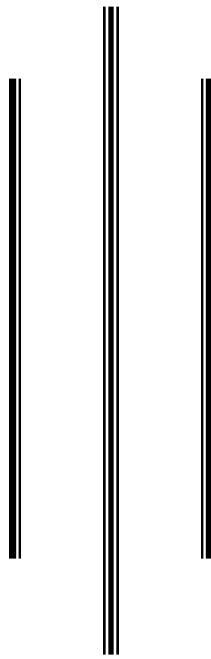


**RENCANA STRATEGIS
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2011-2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2011-2015**

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin menuntut keterbukaan dan dihadapkan pada persaingan global, maka penyelenggaraan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, secara proporsional merupakan tuntutan yang harus segera ditindaklanjuti.

Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan kewenangan penuh kepada daerah bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian kewenangan penuh melalui penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dimaksudkan untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan baik.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan lebih baik, berdaya guna apabila didukung oleh situasi yang kondusif yaitu situasi aman, tertib tanpa adanya gejolak sosial, tercukupinya sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (BAB VIII Pasal 23, 24, 25, 26) yang mengatur kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga praktis lebih banyak terlibat pada kegiatan-kegiatan yang bersifat memfasilitasi, mengkoordinasikan perkembangan dinamika sosial politik, keamanan dalam masyarakat dalam rangka keberhasilan otonomi daerah. Dengan demikian sangat diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan dukungan dana yang memadai.

Penyusunan Rencana Strategis pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan langkah awal dalam usaha perbaikan kinerja Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan Daerah dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RENSTRA yaitu memberikan gambaran/perencanaan berbagai program dan kegiatan lima tahun kedepan yang ada pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah membantu Bupati dalam menetapkan kebijakan dalam penanganan dibidang pembinaan kesatuan bangsa kemasyarakatan dan politik agar lebih berdaya guna.

C. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan RENSTRA sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Permendagri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga

D. KEDUDUKAN DAN PERANAN RENSTRA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Renstra SKPD yang dalam penyusunannya mengacu pada RPJM Daerah, posisinya berada dibawah RPJM Daerah merupakan posisi yang strategis. Oleh karena itu, Renstra SKPD yang berkualitas akan sangat mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Renstra SKPD yang merupakan perencanaan lima tahunan mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, Renstra yang berkualitas akan sangat mendukung/memudahkan penyusunan Renja SKPD yang pada akhirnya akan memudahkan Pemda dalam menyusun APBD di Tingkat kabupaten Purbalingga.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

BAB III GAMBARAN KINERJA PEMBANGUNAN

BAB IV ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

BAB V VISI, MISI DAN STRATEGI

BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII PENUTUP

BAB II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

A. STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung pelaksana Pemerintahan Daerah dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Adapun susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa ;
- d. Seksi Pembinaan Sosial Politik ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan kesatuan bangsa, kemasyarakatan dan politik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tersebut diatas mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik ;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan dibidang kesatuan bangsa dan politik ;
- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- d. Pelaksanaan penguatan nilai-nilai kebangsaan ;
- e. Fasilitasi dan pengelolaan dinamika politik, ekonomi dan sosial budaya ;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan ;
- g. Mengadakan fasilitasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

C. KONDISI KEPEGAWAIAN TAHUN 2011 DAN SARANA PRASARANA

Kondisi pegawai pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (sementara) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah total pegawai yaitu : 35 orang

Terdiri dari PNS sebanyak 33 orang dan PTT sebanyak 2 orang

Rincian menurut golongan :

- a. Golongan IV = 1 orang
- b. Golongan III = 13 orang
- c. Golongan II = 17 orang
- d. Golongan I = 2 orang
- e. PTT = 2 orang

Rincian menurut pendidikan :

- a. S2 sebanyak 1 orang
- b. S1 sebanyak 1 orang
- c. D3 sebanyak 4 orang
- d. SLTA sebanyak 22 orang
- e. SLTP sebanyak 5 orang
- f. SD sebanyak 2 orang

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Kantor Kesatuan bangsa dan Politik pada saat ini relatif kurang memadai dan tidak mendukung kinerja secara optimal.

Peralatan komputer terbatas jumlahnya dan sudah tidak layak pakai (usia sudah tua) dan ketinggalan jaman. Kendaraan dinas roda 2 (dua) jumlahnya terbatas dan sudah tidak layak pakai (biaya perawatan tinggi).

Belum mempunyai ruang rapat, kamar mandi dan WC. Karena ruang rapat yang dahulu saat ini menjadi aset Satpol PP. Demikian pula kamar mandi dan WC juga saat ini sudah menjadi milik Satpol PP.

Hal ini terjadi karena ada kesepakatan pembagian aset saat seksi Pol PP berubah menjadi satuan kerja yang berdiri terpisah (Satpol PP)

Kekurangan lain yaitu belum adanya jaringan PDAM. Oleh karena itu, hal yang berkaitan dengan kerumahtanggaan (dapur dan tempat cuci) menjadi kebutuhan yang belum tercukupi.

Bangunan/ gedung adalah bekas TK. Pertiwi dengan lay-out ruangan kurang memadai.

Dengan kondisi yang ada saat ini diharapkan 5 (lima) tahun kedepan kondisinya sudah berubah sehingga kinerja Aparat lebih optimal.

D. SISTEM, PROSEDUR, MEKANISME PELAKSANAAN FUNGSI SKPD

Adapun sistem, prosedur dan mekanisme pelaksanaan fungsi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dapat dijelaskan pada SOP sebagai berikut :

BAB III. GAMBARAN KINERJA PEMBANGUNAN

Gambaran kinerja pembangunan, khususnya kinerja pembangunan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga, dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut :

BIDANG IDEOLOGI

Kondisi Saat ini

Secara umum Pancasila sebagai dasar dan pedoman hidup Bangsa Indonesia masih diterima oleh masyarakat, namun pada umumnya sudah mulai luntur dalam mengamalkan Pancasila. Pada saat ini dapat kita lihat dan rasakan masih banyak terjadi konflik dimasyarakat, baik dikalangan bawah maupun atas dengan latar belakang permasalahan yang bermacam-macam

Prediksi Lima Tahun ke Depan

Pada Dasarnya upaya pembelaan terhadap negara/ bela negara adalah pola sikap dan pola perilaku yang dijiwai kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, menghayati dan mengamalkan Pancasila serta UUD 1945, sehingga memiliki keyakinan akan hak, kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai warga negara yang rela berkorban untuk membela bangsa dan negara demi eksistensinya. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk pengabdian setiap warga negara sesuai dengan kemampuan dalam bidang profesi masing-masing dengan kerja keras dan tetap menjaga harkat martabat bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kecintaan terhadap tanah air/ negara belum optimal, karena belum optimalnya pembelaan terhadap negara/ bela negara, sehingga masih perlu ditumbuh- kembangkan dan ditingkatkannya kesadaran berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, dan ikut menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan serta meningkatkan kerukunan, persatuan dan kesatuan.

Permasalahan yang ada

1. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami perlunya kecintaan terhadap tanah air serta arti penting rasa persatuan dan kesatuan.
2. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami , menghayati dan mengamalkan Pancasila sebagai Idiologi Negara.
3. Walaupun situasi dan kondisi Purbalingga pada tahun 2010 secara umum kondusif namun masih ada kerawanan- kerawanan yang dapat mengganggu stabilitas daerah dan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa baik dari segi Idiologi , politik , Ekonomi, maupun Sosial Budaya.
4. Kelompok-kelompok Radikal (Radikal kanan , Radikal kiri, dan Radikal lainnya) selalu memanfaatkan situasi dan moment- moment tertentu untuk kepentinganya sendiri/ kelompoknya, sehingga dapat menimbulkan kerawanan sosial.

5. Perkembangan kegiatan orang-orang eks. G.30.S/PKI saat ini leluasa mengembangkan maupun membentuk organisasi/ yayasan untuk melakukan kegiatan seperti YPKP, dan lain- lain serta menggunakan cara-cara melakukan kegiatan seni dan orasi oleh tokoh-tokoh mereka dengan tujuan ingin memunculkan kembali ideologi komunis ke Indonesia dengan memutar balikan sejarah G.30.S/PKI yang seakan-akan PKI tidak bersalah terhadap bangsa dan negara.

Selain itu mereka berusaha untuk dapat ikut dalam Pemilu yang akan datang dengan membentuk Partai Persatuan Pembebasan Nasional (PAPERNAS) serta berusaha mencari simpati masyarakat dengan slogan-slogan dan tema yang menggunakan kepentingan rakyat kecil.

Masih eksisnya tokoh-tokoh tua PKI yang telah mengilhami lahirnya Pakorba (Paguyuban Korban Orba) dan YPKP (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan Tahun 1965/1966), GRI (Gerakan Rakyat Indonesia), dan organisasi-organisasi/ yayasan sejenis yang saat ini sudah eksis hampir di seluruh Kabupaten/ Kota, Secara rutin mereka mengadakan pertemuan dengan tempat yang selalu berpindah-pindah. Walaupun secara fisik Partai Komunis sudah tidak ada di Indonesia, namun pemikiran/ paham / ideologi komunis tetap merupakan bahaya laten yang sewaktu-waktu dapat muncul kepermukaan. Hal ini harus terus diwaspadai, mengingat saat ini kelompok Radikal kiri terus melakukan pengkondisian dan melakukan provokasi serta melaksanakan kegiatan Link-up dengan kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok lainnya. Mereka melakukan kegiatan dengan memanfaatkan moment-moment yang ada sebagai sasaran antara dan arah sebenarnya adalah untuk menggoyang kewibawaan Pemerintah dan menumbuhkan kembali idologi Komunis di Indonesia.

Adapun kegiatan kelompok Radikal kiri yang dilakukan selama ini pada intinya antara lain :

- a. Melakukan Registrasi/ pendataan kembali terhadap eks. Tahanan G.30.S/PKI dan orang- orang yang merasa dirugikan oleh pemerintah masa lalu akibat peristiwa G.30.S/PKI.
 - b. Pengumpulan dana dengan berbagai cara terhadap simpatisan dan pihak-pihak lain untuk menopang kegiatan yang mereka laksanakan.
6. Adanya indikasi masih digunakan sebagai tempat yang dianggap strategis untuk perekrutan kelompok teroris, tempat persembunyian teroris serta adanya indikasi kembalinya aktivis-aktivis radikal dari daerah konflik ke Purbalingga.
 7. Adanya indikasi kelompok yang menginginkan berdirinya Negara Islam Indonesia dengan memberlakukan syariat Islam seperti kelompok-kelompok Jamaah Islamiyah , dan Front Pembela Islam beserta laskar- laskarnya.

8. Masih adanya kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap kebijakan Pemerintah yang melakukan kegiatan dengan cara unjuk rasa/ mimbar bebas dengan mengangkat isu kebijakan Pemerintah yang dianggap tidak sesuai dan tidak berpihak pada kepentingan kelompoknya serta melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat provokasi terhadap masyarakat melalui masalah-masalah sosial yang dikaitkan dengan isu HAM, Demokratis dan Keadilan serta Penegakan supremasi Hukum.
9. Kecenderungan menurunnya semangat kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa yang dapat mengancam keutuhan NKRI.
10. Kecenderungan menurunnya kerukunan dan keharmonisan antar komponen bangsa
11. Kecenderungan semakin melunturnya apresiasi terhadap bahasa Indonesia dan lebih mengagungkan penggunaan bahasa asing dalam dunia pendidikan , iklan, media cetak ataupun elektronik.
12. Kecenderungan menurunnya nilai-nilai nasionalisme dan pemahaman tentang demokratis dan HAM

Solusi

1. Perlunya Pendidikan Pancasila masuk dalam kurikulum disekolah
2. Perlunya diadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kerukunan, persatuan dan kesatuan diantara warga masyarakat dan kecintaan terhadap tanah air, melauai Forkesbang (Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa).
3. Perlunya diadakan kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman, penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebagai Ideologi Negara.
4. Mengadakan kegiatan deteksi dini dan cegah dini bersama dinas instansi terkait dan aparat keamanan.
5. Mengadakan monitoring dan antisipasi bersama dengan aparat pengamanan terkait terhadap kegiatan-kegiatan kelompok radikal yang ada.
6. Merapatkan barisan baik dari Pemerintah Daerah dan aparat keamanan untuk membatasi ruang gerak teroris atau membentengi masyarakat agar tidak mudah terhasut.
7. Mengadakan operasi-operasi pengamanan terpadu dan penyelesaian dengan melaksanakan tindakan sesuai hukum yang berlaku bagi pelanggarnya
8. Melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan Orang Asing bersama dengan aparat keamanan dan dinas Instansi terkait.
9. Pengembangan dan aplikasi wawasan kebangsaan serta nilai-nilai kebangsaan.
10. Peningkatan solidaritas dan kesatupaduan masyarakat.
11. Peningkatan dan pelestarian penggunaan bahasa Indonesia dan penertiban penggunaan bahasa Asing.

12. Penguatan Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional dalam berbagai dimensi kehidupan.

14. Pengkajian demokratisasi, HAM, dan masalah strategis daerah.

BIDANG POLITIK

Kondisi Saat ini

Secara umum situasi politik di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2010 bisa dikatakan cukup stabil dan dinamis. DPD/DPC Parpol tetap melakukan kegiatan sesuai program kerja masing-masing, utamanya kegiatan konsolidasi organisasi dalam rangka persiapan kader-kadernya maju Pemilu tahun 2014 yang akan datang. Sedangkan dalam tataran Lembaga Legislatif, Para Kader Parpol yang duduk didalam keanggotaan DPRD tetap aktif melaksanakan tugas-tugas sebagai mitra kerja Eksekutif, dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta peningkatan kesejahteraan rakyat, walaupun dalam pelaksanaannya kadang-kadang diwarnai oleh dinamika kebebasan. Namun demikian kita tidak boleh mengabaikan adanya perkembangan situasi nasional serta berbagai situasi daerah yang berlangsung, karena yang sering terjadi, kerawanan situasi nasional selalu menjadi pemicu timbulnya kerawanan situasi daerah, demikian pula sebaliknya.

Prediksi Lima Tahun ke Depan

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 29 menyebutkan Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap Warga Negara Indonesia untuk menjadi :

- a. Anggota Partai Politik;
- b. Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
- d. Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Rekrutmen dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan penetapan atas rekrutmen dilakukan dengan keputusan pengurus sesuai dengan AD dan ART.

Dengan demikian pada masa 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi Penyelenggaraan Pemilihan Umum yakni :

1. Pemilihan Umum Gubernur Jateng pada Tahun 2013;
2. Pemilihan Umum Legislatif pada tahun 2014;
3. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Pesiden pada Tahun 2014
4. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2015;

Permasalahan yang ada

Efek bagi Demokrasi ke depan adalah :

1. Jumlah Parpol lebih sedikit, karena pendirian dan pembentukannya cukup sulit dan mahal;
2. Parpol lebih profesional dan akuntabel;
3. Parpol-parpol kecil saat ini sedang menyiapkan judicial review;

Solusi

1. Dalam rangka penguatan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran partai politik sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat.
2. Suhu politik di Pubalingga diperkirakan akan meningkat apalagi menjelang pelaksanaan Pemilu Gubernur, Legislatif dan Pemilu Presiden, dimana partai-partai politik terutama partai politik besar saling melakukan konsolidasi untuk meraih suara sebanyak-banyaknya.
3. Memfasilitasi, Kerjasama dan mensinergikan program-program kegiatan dengan Pemerintah Kabupaten, Partai Politik , Ormas dan LSM.
4. Melaksanakan Rakor, Forum dan Roadshow Pimpinan Daerah dan Pimpinan Parpol/Sayap Parpol , menyelenggarakan Pendidikan Politik, Budaya dan etika Politik bagi masyarakat elit Politik, Mahasiswa dan Pelajar.
5. Menyelenggarakan Pendidikan Politik, Budaya dan Etika Politik bagi masyarakat elit politik, Mahasiswa dan Pelajar
6. Melakukan pembinaan secara terus menerus kepada Pimpinan Parpol, masyarakat akan hak-haknya sebagai warga Negara.

BIDANG EKONOMI

Kondisi Saat ini

Dibidang ekonomi bisa dikatakan kondusif walau ada beberapa permasalahan yang muncul, namun tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Permasalahan-permasalahan bidang ekonomi antara lain :

1. Program konversi minyak tanah ke gas LPG oleh pemerintah menjadikan berkurangnya pasokan minyak tanah dari Pertamina ke agen sehingga menyebabkan kelangkaan dan mahalnya minyak tanah di sejumlah wilayah.
2. Kelangkaan gas LPG akibat kurang pasokan.
3. Kelangkaan Pupuk Bersubsidi.

Prediksi Lima Tahun ke Depan

1. Terwujudnya Ketahanan di Bidang Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Fiskal dan Moneter.
2. Terwujudnya Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi dan Ormas Perekonomian serta tersedianya kesempatan kerja dan penghidupan yang layak
3. Terwujudnya rasa aman, damai, iklim sejuk serta kondusif.

Permasalahan yang ada

1. Mewujudkan Ketahanan di Bidang Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Fiskal dan Moneter.
2. Mewujudkan Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi dan Ormas Perekonomian serta tersedianya kesempatan kerja dan penghidupan yang layak
3. Mewujudkan rasa aman, damai, iklim sejuk serta kondusif.

Solusi

- a. Pemantauan Dampak Kebijakan Ekonomi.
- b. Pemantauan Dampak kelangkaan / Kenaikan Harga sembako dan bahan penting lainnya.

BIDANG SOSIAL BUDAYA

Kondisi Saat ini

Dari segi sosial budaya pada tahun ini masih termasuk dalam taraf yang rentan, karena memang lingkungan masyarakat mudah terpicu oleh keadaan terutama masalah ekonomi, disamping itu akibat banyaknya unjuk rasa/ demo akan dapat membentuk opini pada masyarakat yang dapat menimbulkan kerawanan.

Masih maraknya peredaran Narkoba dan Miras yang terus berkembang meskipun upayaantisipasi dari aparat keamanan sudah cukup maksimal, namun belum mampu mengantisipasi peredarannya yang terus berkembang luas dimasyarakat. Ditenggarai sebagai ajang peredaran obat terlarang dan miras banyak menggunakan tempat hiburan malam. Dengan kejadian-kejadian yang ada tersebut menyebabkan tempat-tempat hiburan malam menjadi rawan, karena bagi yang ingin menikmati sudah tidak ada kenyamanan lagi, oleh karena itu sewaktu-waktu bisa diadakan operasi oleh pihak keamanan. Permasalahan aliran jamaat Ahmadiyah dengan dikeluarkannya SKB 3 Menteri (Menteri agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri) No. 3 tahun 2008, No Kep-033/A/JA/6/2008 dan No 199 tahun 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota dan atau anggota pengurus jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat yang pada prinsipnya tidak boleh mengembangkan ajaran tersebut dan harus kembali sesuai Syariat Islam, aparat keamanan dan Instansi Teknis (Kantor Kementrian Agama) melakukan pemantauan dan pembinaan secara berkelanjutan.

Prediksi Lima Tahun ke Depan

Walaupun situasi wilayah Purbalingga relatif stabil dan dinamis, namun kita tidak boleh mengabaikan adanya situasi yang terjadi dalam skala Nasional. Karena pada dasarnya perkembangan situasi yang terjadi di daerah khususnya dibidang Politik, lebih banyak disebabkan oleh manuver atau gesekan politik tingkat atas. Sedangkan untuk perkiraan jangka panjang, kiranya patut diwaspadai adanya berbagai fenomena sosial dan kemasyarakatan daerah, apabila tidak memperoleh upaya penyelesaian secara tuntas, jujur dan transparan dapat berubah menjadi potensi kerawanan yang semakin sulit untuk diatasi.

Masalah terorisme, dengan kenyataan bahwa Purbalingga ternyata ada warga yang menjadi anggota terorisme, masyarakat bersama dengan aparat keamanan cukup mewaspadai dan ikut membangun benteng pada masing-masing lingkungannya, maka hal tersebut sedikit banyak telah dapat mempersempit ruang gerak teroris, apalagi trio bom bali 1 (Amrozy, Ali gufron alias Muklas dan Imam Samudra) yang di tahan di LP Nusa Kambangan telah di eksekusi mati pada tanggal 9 Nopember 2008 pukul 00.15 WIB, bertempat di Nirbaya Kabupaten Cilacap. Namun kita harus waspada untuk masa-masa yang akan datang sebab tidak menutup kemungkinan kelompok-kelompok mereka akan melakukan aktivitas terorisme di Purbalingga.

Permasalahan yang ada

1. Peningkatan Solidaritas dan kesetiakawanan serta persaudaraan dengan kesatu paduan gerak, kebersamaan, kekompakan seluruh komponen bangsa merupakan langkah antisipasi terhadap terjadinya konflik dan gejolak sosial.
2. Pemasyarakatan bahasa Indonesia dan penertiban penggunaan bahasa asing mendukung pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia.
3. Penguatan kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Bangsa merupakan langkah preventif dan represif terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG)
4. Mantapnya nilai-nilai nasionalisme dan pemahaman tentang demokratisasi dan HAM merupakan upaya strategis dalam memantapkan rasa cinta tanah air, menghargai perbedaan pendapat dan menghargai Hak Asasi Manusia.
5. Iklim sejuk, iklim kondusif dan kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan dapat terus dimantapkan melalui jalinan silaturahmi dan kebersamaan semua komponen bangsa
6. Peningkatan dan pemantapan wawasan dan kesadaran kebangsaan serta nilai-nilai kebangsaan merupakan salah satu cara memberikan kesadaran akan pentingnya penguatan persatuan dan kesatuan bangsa guna tegak kokohnya NKRI.

7. Belum adanya pemahaman tugas dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat bagi aparat terkait.
8. Belum terciptanya kesamaan visi, misi persepsi terhadap keberadaan FKDM.

Solusi

1. Namun kita harus tetap waspada untuk masa-masa yang akan datang sebab tidak menutup kemungkinan kelompok-kelompok mereka akan melakukan aktifitas terorisme di Purbalingga.
2. Belum terpadunya pemahaman terhadap Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang merupakan urusan wajib Pemerintahan yang di amanatkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
3. Belum adanya pemahaman tugas dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat bagi aparat terkait.
4. Belum terciptanya kesamaan visi, misi persepsi terhadap keberadaan FKDM.
5. Forum Komunikasi dan Koordinasi atau sebutan lainnya yang melibatkan Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda selama ini hanya berupa retorika dan sebatas sosialisasi pembinaan, belum mengarah pada format kelembagaan yang kokoh dan melahirkan pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat untuk mempengaruhi keanggotaanya.
6. Pemeliharaan keharmonisan dan kerukunan Antar Umat Beragama serta Antar Penghayat Kepercayaan.
7. Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat serta Akulturasi Budaya.
8. Pemeliharaan dan Pengembangan Seni serta Budaya Daerah.
9. Pendayagunaan Potensi Organisasi Kemasyarakatan

BIDANG KEAMANAN

Kondisi Saat ini

Dalam menyikapi perkembangan situasi kondisi wilayah menjelang dan pasca Pemilu guna mengantisipasi secara dini isu-isu aktual yang berkembang di daerah agar tidak menjadi ancaman terhadap stabilitas dan kondusifitas daerah diselenggarakan Rapat Koordinasi Pengamanan bersama aparat terkait.

Prediksi Lima Tahun ke Depan

Guna mengantisipasi perkembangan situasi keamanan yang terjadi Menjelang Pemilihan Umum Gubernur, Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden, bersama dengan unsur-unsur Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), melaksanakan deteksi dini dalam rangka mengantisipasi kerawanan dan kemungkinan-kemungkinan konflik yang terjadi didaerah serta guna mengantisipasi tidak meluasnya aksi terorisme serta tindak kriminal lainnya.

Permasalahan yang ada

1. Belum optimalnya dalam melaksanakan tugas monitoring dan pengamanan serta fasilitasi terhadap kegiatan-kegiatan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen masyarakat.
2. Belum adanya pemahaman tugas dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat bagi aparat terkait.
3. Belum terciptanya kesamaan visi, misi persepsi terhadap keberadaan FKDM.

Solusi

1. Terbatasnya Anggaran untuk Kegiatan KOMINDA guna melaksanakan kegiatan cipta kondisi dan Pengamanan, menjelang Pemilu.
2. Kegiatan FKDM dalam Anggaran perubahan untuk dapatnya dimasukkan kembali dalam DPA.

BIDANG ASET

Kondisi saat ini peralatan komputer terbatas dan sudah tidak layak pakai, serta belum mempunyai ruang rapat, kamar mandi, WC serta jaringan PDAM.

Kondisi lima tahun kedepan diharapkan komputer sudah tersedia dengan jumlah yang cukup dan kualitas baik, sehingga bisa mengakses program-program yang besar. Sudah tersedianya ruang rapat, kamar mandi, WC, serta jaringan PDAM (air minum).

Permasalahan yang ada yaitu tidak bisa menyelesaikan tugas dengan cepat disebabkan karena jumlah komputer terbatas dan sudah tidak layak pakai. Penerapan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sehingga aset kantor dibagi menjadi dua yaitu untuk Kantor Kesbang Pol Linmas dan Kantor Satpol PP. Sehingga Kantor Kesbang Pol tidak mempunyai ruang rapat, kamar mandi, WC dan jaringan air minum.

Solusinya penyediaan komputer yang berkualitas dengan jumlah yang cukup sehingga mendukung pelaksanaan tugas. Membangun ruang rapat, kamar mandi, WC dan pemasangan jaringan air minum.

BIDANG KEUANGAN

Alokasi anggaran pada tiap-tiap kegiatan selalu mengalami penurunan bila dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, sementara volume pekerjaan semakin meningkat dan harga-harga mengalami kenaikan.

Kondisi lima tahun kedepan yang diharapkan yaitu alokasi anggaran meningkat sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas secara optimal.

Permasalahan yang ada yaitu jumlah anggaran yang terbatas sehingga hasil kegiatan tidak maksimal.

Solusinya tersedianya jumlah anggaran yang memadai sesuai kondisi yang ada saat itu dan secara normatif sesuai kebutuhan riil dilapangan.

DATA INFORMASI PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2010

Data informasi pendukung capaian kinerja tahun 2010 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada Kantor Kesbang Pol dan Linmas terdapat 9 program dan 19 kegiatan yaitu :

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
 - Kegiatan penyediaan bahan dan jasa perkantoran
 - Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
 - Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana
- c. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
 - Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai
- d. Program fasilitasi lembaga politik terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
 - Kegiatan pengelolaan bantuan keuangan kepada Parpol dan fasilitasi kegiatan Parpol
- e. Program pembinaan kehidupan sosial politik terdiri dari 3 kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB)
 - Kegiatan Ormas, LSM dan pemantauan aspirasi masyarakat
 - Kegiatan fasilitasi Orpol dan penyusunan data peta Partai Politik
- f. Program pembinaan wawasan kebangsaan terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
 - Kegiatan sarasehan pembauran etnis
- g. Program peningkatan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat terdiri dari 8 kegiatan yaitu :
 - Kegiatan keamanan terpadu
 - Kegiatan Pemberdayaan Badan Koordinasi dan Informasi
 - Kegiatan pelatihan pemadam kebakaran, SAR air, SAR gunung
 - Kegiatan pemantauan daerah rawan bencana dan kejadian bencana
 - Kegiatan pelatihan Satlinmas Inti

- Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
 - Kegiatan Pam Tup Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Tamu VVIP
 - Kegiatan pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010
- h. Program wawasan kebangsaan terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
- Kegiatan Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (Forkomkesbang)
- i. Program penyediaan dan penyempurnaan data dan informasi pemerintahan dan pembangunan terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
- Kegiatan penyusunan data statistik Kesbang Pol dan Linmas

Adapun alokasi dan realisasi anggaran sebagai berikut :

Pada satuan kerja kami Pagu anggaran tahun 2010 sejumlah Rp 3.141.563.000,- (Tiga milyar seratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari :

- a. Belanja tidak langsung (gaji pegawai) sebesar Rp 1.227.908,- (Satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan rupiah).
- b. Belanja tidak langsung untuk kegiatan sebesar Rp 1.913.655.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terbagi dalam 9 program dan 19 kegiatan, yang terinci dan terealisasi dengan alokasi anggaran perkegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan bahan dan jasa perkantoran dengan alokasi anggaran Rp 132.110.000,- dan terpakai untuk kegiatan Rp 125.058.207,- (95%), dengan capaian pegawai pada Kantor Kesbang Pol dan Linmas sejumlah 36 terealisasi 100 %.
 - 2) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan alokasi anggaran Rp 76.100.000,- dan terpakai untuk kegiatan Rp 72.405.500,- (95%) dengan capaian program perjalanan dinas dalam dan luar daerah 100%.
 - 3) Pemeliharaan sarana dan prasarana dengan alokasi anggaran Rp 105.792.000,- terpakai untuk kegiatan Rp 105.737.503,- (99,9%), dengan capaian program 1 gedung, 17 kendaraan dan 16 peralatan kantor 100 %.
 - 4) Pendidikan dan pelatihan pegawai dengan alokasi anggaran Rp 10.000.000,- dan terpakai untuk kegiatan Rp 7.450.000,- (74,5%), dengan capaian program diklat yang harus dilaksanakan PNS sebanyak 20 orang 100 %.
 - 5) Pengelolaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dengan alokasi anggaran Rp 6.695.000,- terpakai untuk kegiatan Rp 6.194.000,- (92,5%) dengan capaian program tersalurnya bantuan keuangan kepada Parpol yang mempunyai jatah kursi di DPRD 9 Parpol 100 %.

- 6) Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) alokasi anggaran Rp 26.940.000,- terpakai untuk kegiatan Rp 26.940.000,- (100%), dengan capaian program berupa peserta kegiatan terdiri dari umat beragama dan penganut kepercayaan sebanyak 240 orang 100 %.
- 7) Fasilitasi kegiatan Ormas LSM dan pemantauan aspirasi masyarakat alokasi anggaran Rp 9.645.000,- terpakai untuk kegiatan Rp 9.645.000,- (100%) dengan capaian program sarasehan Ormas dan LSM di Kabupaten Purbalingga sebanyak 150 orang 100 %.
- 8) Fasilitasi kegiatan Orpol dan penyusunan data, peta dan Partai Politik alokasi anggaran Rp 9.426.000,- terpakai untuk kegiatan Rp 9.426.000,- (100%) dengan capaian program pertemuan anggota Orpol 150 orang untuk dasar menyusun data peta Parpol 100 %.
- 9) Sarasehan pembauran etnis alokasi anggaran Rp 13.392.000,- terpakai untuk kegiatan Rp 13.305.000,- (99%) dengan capaian program sarasehan bagi anggota dan pengurus Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) 100 %.
- 10) Keamanan Terpadu alokasi anggaran Rp 200.000.000,- (100%) dengan capaian program keterpaduan dan kesiapan PAM bagi 6 Institusi Muspida 100%.
- 11) Pemberdayaan Badan Koordinasi dan Informasi alokasi anggaran Rp 13.562.000,- terpakai untuk kegiatan Rp 13.305.000,- (98%), dengan capaian program terselenggaranya kegiatan Bakorinfo untuk mengkoordinir informasi/isu yang berkembang oleh anggota Kominda sebanyak 22 orang 100%.
- 12) Pelatihan pemadam kebakaran, SAR air, dan SAR gunung alokasi anggaran Rp 18.653.000,- terpakai untuk kegiatan sebesar Rp 18.597.000,- (99,7%) dengan capaian program anggota Satgas PBP yang harus mengikuti latihan sebanyak 2500 orang 100%.
- 13) Pemantauan daerah rawan bencana dan kejadian bencana dan evakuasi tanggap darurat alokasi anggaran Rp 8.290.000,- dan terpakai untuk kegiatan Rp 8.272.000,- (99,8%). Daerah rawan bencana di Kabupaten Purbalingga yang harus dipantau sebanyak 18 daerah kecamatan 100%.
- 14) Pelatihan Satlinmas Inti alokasi anggaran Rp 20.767.000,- dan terpakai untuk kegiatan Rp 20.767.000,- (100%) dengan capaian program anggota Satlinmas yang harus dilatih 31 orang 100%.
- 15) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) alokasi anggaran sebesar Rp 19.376.000,- dan terealisasi Rp 19.305.000,- (99,6%) dengan capaian program terciptanya kerjasama FKDM kabupaten, FKDM kecamatan dan masyarakat dengan rapat koordinasi 120 orang tokoh agama dan tokoh masyarakat 100%.

- 16) PAM Tup Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Tamu VVIP alokasi anggaran Rp 39.507.000,- dan terealisasi Rp 36.780.000,- (93%) dengan capaian program terselenggaranya PAM Tup Lebaran, Natal, Tahun Baru dan tamu VVIP bagi tim PAM Tup 20 orang 100%.
- 17) Pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2010, alokasi anggaran Rp 1.166.964.000,- dan terealisasi Rp 1.058.731.875,- (90,7%) dengan capaian program keterpaduan dan kesiapan petugas PAM dalam Pemilukada tahun 2010 di Kabupaten Purbalingga.
- 18) Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa dengan alokasi anggaran Rp 26.656.000,- dan untuk kegiatan terealisasi Rp 26.283.500,- (98,6%) dengan capaian program terselenggaranya FKKB untuk tokoh agama dan tokoh masyarakat di 8 desa, masing-masing desa 50 orang dengan jumlah 400 orang.
- 19) Penyusunan data statistik Kesbang Pol dan Linmas alokasi anggaran Rp 9.780.0000,- dan terpakai untuk kegiatan sebesar Rp 9.780.000,- (100%) dengan capaian program buku KTA yang harus disusun 10 buah buku yang berisi masing-masing data KTA anggota Linmas 75 orang.

Informasi yang berkaitan dengan tupoksi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Data Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kabupaten Purbalingga :
 1. PT. Hamni Hair International = 3 orang
 2. PT. Milan Indonesia = 2 orang
 3. PT. Hyup Sung Indonesia = 3 orang
 4. PT. Sinhan Creatindo = 1 orang
 5. PT. Sunstarindo Wirausaha = 4 orang
 6. PT. Hasta Pusaka Sentosa = 4 orang
 7. PT. Interwork Indonesia = 1 orang
- Data izin rekomendasi dari penelitian tahun 2010 sebanyak 549 buah
- Data LSM sejumlah 18 buah, terinci sebagai berikut :
 - Aktif = 15 LSM
 - Tidak aktif = 3 LSM
- Data Ormas sejumlah 31 buah, terinci sebagai berikut :
 - Aktif = 25 Ormas
 - Tidak aktif = 6 Ormas
- Data Ormas Pemuda sejumlah 12 buah, terinci sebagai berikut :
 - Aktif = 7 buah
 - Tidak aktif = 5 buah

BAB IV. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Meliputi Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) yaitu kondisi, situasi keadaan peristiwa dan pengaruh-pengaruh didalam dan disekeliling organisasi Kantor Kesbang Pol Kabupaten Purbalingga berupa kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal dan tantangan eksternal.

Mengenai analisis lingkungan kami ambil hal-hal yang cukup dominan saja, yaitu :

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Kekuatan :

- Adanya tugas pokok dan fungsi
- Adanya program kerja
- Adanya koordinasi yang baik
- Adanya motivasi kerja yang tinggi

Kelemahan :

- Anggaran sangat terbatas
- Sarana dan prasarana sangat terbatas
- Tingkat profesionalisme dan disiplin pegawai masih rendah
- Sistem informasi belum mantap (ketinggalan jaman)

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Peluang :

- Adanya otonomi daerah
- Adanya stabilitas pemerintahan
- Adanya tanggapan yang cukup baik atas kinerja Aparatur Pemerintahan
- Adanya partisipasi masyarakat

Ancaman :

- Adanya teroris yang mengancam keutuhan NKRI
- Adanya konflik horisontal pada tingkat elit politik
- Kenaikan harga-harga sembako yang dampaknya mengecewakan masyarakat
- Masih adanya unjuk rasa masyarakat yang cenderung anarkis

Rumusan strategi yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Manfaat tugas pokok dan fungsi secara efektif untuk mengatasi anggaran yang sangat terbatas.
2. Manfaatkan program kerja yang ada secara efektif dengan memakai sarana dan prasarana yang sangat terbatas.

3. Laksanakan koordinasi yang baik untuk mengatasi sistem informasi yang belum mantap.
4. Manfaatkan motivasi kerja yang tinggi untuk meningkatkan profesionalisme dan disiplin pegawai yang masih rendah.
5. Manfaatkan otonomi daerah yang telah ada untuk mengurangi dampak negatif konflik horisontal pada tingkat elit politik.
6. Manfaatkan stabilitas pemerintahan yang ada secara efektif untuk mengatasi/mengurangi dampak negatif adanya unjuk rasa yang dapat menimbulkan tindakan anarkis.
7. Manfaatkan tanggapan yang cukup baik atas kinerja Aparat Pemerintah untuk mengatasi/mengurangi dampak negatif akibat kenaikan harga-harga sembako.
8. Manfaatkan partisipasi masyarakat secara efektif untuk membatasi ruang gerak teroris yang mengancam keutuhan NKRI.

BAB V. VISI, MISI DAN STRATEGI

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dengan menyesuaikan tupoksi yang berlaku saat ini, maka menetapkan visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi

Terwujudnya kondisi politik yang lebih demokratis, kondisi masyarakat yang aman, dan damai dalam rangka mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga mempunyai misi sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kemantapan wawasan kebangsaan, idiologi, ketahanan bangsa dan kesadaran bela negara
 - b. Mewujudkan sistem politik yang demokratis dan situasi kondusif
3. Tujuan yang terdapat pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga yaitu :
- a. Mengupayakan peningkatan peran dan fungsi Ormas, Orpol, LSM, dan elemen masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan kemantapan wawasan kebangsaan, idiologi Pancasila, ketahanan bangsa, pembauran dan kesadaran bela negara
 - b. Mengupayakan peningkatan peran dan fungsi partai politik untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis dan situasi kondusif
4. Sasaran yang akan dicapai pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga yaitu :
- a. Terdukungnya kebutuhan ATK, listrik dan air minum
 - b. Tercukupinya berbagai perjalanan dinas
 - c. Terpeliharanya gedung dan peralatan kantor
 - d. Terwujudnya peningkatan SDM PNS
 - e. Terdukungnya kegiatan Parpol dan terciptanya tertib administrasi keuangan Parpol
 - f. Terakomodasinya penyelesaian sengketa pendirian rumah ibadah dan terwujudnya program kerja FKUB
 - g. Terdukungnya kegiatan Ormas dan terserapnya aspirasi masyarakat
 - h. Terdukungnya kegiatan Parpol
 - i. Terwujudnya peningkatan persatuan dan kesatuan antar etnis di Purbalingga
 - j. Terwujudnya peningkatan persatuan dan kesatuan antar Toga, Toma dan Perangkat

- k. Terwujudnya peningkatan kualitas keamanan
- l. Teratasinya AGHT melalui upaya deteksi dini dan cegah dini
- m. Teratasinya berbagai gangguan keamanan diwilayah Kabupaten Purbalingga
- n. Terwujudnya situasi aman pada saat pemilihan

BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun program dan kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga tahun 2011 sebagai berikut :

1. Program penguatan kelembagaan daerah, terdiri dari 4 kegiatan yaitu :
 - Kegiatan penyediaan bahan dan jasa perkantoran
 - Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
 - Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
 - Kegiatan pendidikan dan pelatihan diklat pegawai
2. Program fasilitasi dan pembinaan kehidupan sosial politik, terdiri dari 5 kegiatan yaitu :
 - Kegiatan pengelolaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dan fasilitasi kegiatan politik
 - Kegiatan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB)
 - Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
 - Kegiatan fasilitasi kegiatan Ormas, LSM, dan pemantauan aspirasi masyarakat
 - Kegiatan fasilitasi kegiatan Orpol dan penyusunan data serta peta Partai Politik
3. Program pembinaan wawasan kebangsaan, terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
 - Kegiatan sarasehan pembauran etnis
 - Kegiatan Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa
4. Program peningkatan perlindungan masyarakat, terdiri dari 6 kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Pam Tup Lebaran, Natal, Tahun baru dan Tamu VIP
 - Kegiatan Pemberdayaan Badan Koordinasi dan Informasi
 - Kegiatan keamanan terpadu
 - Kegiatan Pam Pilgub Jateng tahun 2013
 - Kegiatan Pam Pileg dan PilPres tahun 2014
 - Kegiatan Pam PilBup dan Wabup tahun 2015

MATRIK RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

SKPD : Kantor Kesatuan bangsa dan Politik
Kabupaten Purbalingga

VISI : Terwujudnya kondisi politik yang lebih demokratis, kondisi masyarakat yang aman,
dan damai dalam rangka mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Dalam Ribuan)

Misi dan Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan (output)	Data Capaian Pada Awal Perenc.	Thn-1		Thn-2		Thn-3		Thn-4		Thn-5		Akhir Periode Renstra SKPD		SKPD Penangg.	Lok.
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Misi : Mewujudkan kemantapan wawasan kebangsaan, ideologi, ketahanan bangsa, pembauran dan kesadaran bela negara	Terdukungnya kebutuhan administrasi kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana, bahan dan jasa kantor Indek kepuasan masyarakat terhadap layanan publik		Program Penguatan Kelembagaan Kegiatan : 1. Penyediaan bahan dan jasa perkantoran	Terdukungnya keg. kelembagaan Terpenuhi nya kebutuhan sarana, bahan dan jasakantor Indek kepuasan masyarakat terhdp layanan publik	95 %	100 %	116.500	100 %	133.000	100%	153.000	100 %	175.700	100 %	202.200	100 %	780.400	Kesbang Pol	Pbg
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Tercukupinya berbagai perjalanan dinas	Terlaksananya rapat koordinasi dan sistem akuntabilitas kinerja		2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya rapat koordinasi dan sistem akuntabilitas kinerja	95 %	100%	63.172	100 %	72.872	100 %	83.672	100 %	96.175	100 %	110.675	100 %	426.566	Kesbang Pol	Pbg
	Terpeliharanya gedung dan peralatan kantor	Terpeliharanya prasarana dan sarana kantor		3. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Terpeliharanya prasarana dan sarana kantor	99,9 %	100%	72.386	100 %	83.286	100 %	95.786	100 %	110.085	100 %	126.685	100 %	488.228		
	Terwujudnya peningkatan SDM PNS	Terlaksananya diklat pegawai		4. Pendidikan dan pelatihan pegawai diklat	Terlaksananya diklat pegawai	74,5 %	100%	8.000	100 %	9.000	100 %	10.400	100 %	12.000	100 %	14.000	100 %	53.400		
	Jml Linmas per10000 penduduk Rasio Poskamling/jml desa	Jml Linmas per10000 penduduk Rasio Poskamling/jml desa		5. Penyusunan data statistik Kesbang Pol Linmas	Linmas per10000 penduduk Rasio Poskamling/jml desa	87%	100%	7.500		-		-		-		-		7.500		
						14%	100%													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Program Fasilitasi dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik Kegiatan :	Jumlah kelompok swadaya masyarakat	18 LSM 25 Ormas 12 Ormas Pemuda													Kesbang Pol	Pbg
	Terdukungnya kegiatan parpol, terciptanya tertib administrasi keuangan parpol.	Jumlah kelompok swadaya masyarakat		1. Pengelola n bantuan keuangan kepada Parpol dan fasilitasi kegiatan politik	Jumlah Parpol yg terfasilitasi	9 Parpol	9 Parpol	3.730	9 Parpol	4.300	9 Parpol	4.950	9 Parpol	5.690	9 Parpol	6.550	45 Parpol	25.220		
	Terakomodasi nya penyelesaian sengketa pendirian rumah ibadah dan terwujudnya program kerja FKUB	Jumlah kelompok swadaya masyarakat		2. Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB)	Jumlah Peserta Forum	240 Orang	100 orang	39.830	100 orang	45.750	100 orang	52.550	100 orang	60.450	100 orang	69.500	500 orang	268.080		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Terciptanya kerjasama FKDM Kabupaten, Kecamatan dan masyarakat	Jumlah kelompok swadaya masyarakat		3. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah peserta Forum	120 Orang	-	-	50 orang	20.000	50 orang	25.000	50 orang	30.000	50 orang	35.000	100 orang	110.000	Kesbang Pol	Pbg
	Terdukungnya kegiatan Ormas, dan terserapnya aspirasi masyarakat	Jumlah kelompok swadaya masyarakat		4. Fasilitasi kegiatan Ormas, LSM, dan pemantauan aspirasi masyarakat	Jumlah peserta pembinaan	150 Orang	75 orang	4.826	75 orang	5.600	75 orang	6.450	75 orang	7.420	75 orang	8.550	375 orang	32.846		
	Terdukungnya kegiatan Parpol yang ada di Kabupaten Purbalingga	Jumlah kelompok swadaya masyarakat		5. Fasilitasi kegiatan Orpol dan penyusunan data serta peta Parpol	Jumlah peserta pembinaan	150 Orang	75 orang	4.998	75 orang	5.750	75 orang	6.600	75 orang	7.590	75 orang	8.700	375 orang	33.638		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Gubernur, Pemilu Bupati			Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Gubernur, Pemilu Bupati	71,02% 70,66% 63,83% 66,73%	-	-	-	-	Pilgub 2013 64%	-	Pileg 2014 72% Pilpres 2014 72%	-	Pilbup 2015 70%	-	-	-	Kesbang Pol	Pbg
	Terwujudnya peningkatan persatuan dan kesatuan antar etnis di Purbalingga	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan		Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kegiatan : 1. Sarasehan pembauran etnis	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	3 keg 150 orang	2 keg 75 orang	4.000	2 keg 75 orang	4.600	2 keg 75 orang	5.290	2 keg 75 orang	6.080	2 keg 75 orang	6.980	10 keg 375 orang	26.950		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Misi : Mewujudkan sistem politik yang demokratis, situasi kondusif dan damai	Terwujudnya peningkatan persatuan dan kesatuan antar Toga, Toma dan Perangkat	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan		2. Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	2 keg 400 orang	1 keg 75 orang	14.745	1 keg 75 orang	17.045	1 keg 75 orang	19.650	1 keg 75 orang	22.550	1 keg 75 orang	25.950	5 keg 375 orang	99.940	Kesbang Pol	Pbg	
	Terwujudnya peningkatan kualitas keamanan	Jumlah kasus tindak kekerasan		1. Pam Tup Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Tamu VIP	Jumlah kasus tindak kekerasan	0 kasus	-	14.902	-	17.102	-	19.702	-	22.600	-	25.800	-	100.106			
		Jumlah kasus tindak kekerasan		2. Pemberdayaan Koordinasi dan Informasi	Jumlah kasus tindak kekerasan	19 kasus	-	7.431	-	8.650	-	9.950	-	11.450	-	13.100	-	50.581			
		Jumlah konflik horisontal dlm masy.			Jumlah konflik horisontal dlm masy.	-	-		-		-	-		-		-		-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah kasus <i>trafficking</i>			Jumlah kasus <i>trafficking</i>	3 kasus	-		-		-		-		-		-		Kesbang Pol	Pbg
	Teratasinya berbagai gangguan keamanan di wilayah Kabupaten Purbalingga	Jumlah kasus tindak kekerasan dalam masyarakat		3. Keamanan Terpadu	Jumlah kasus tindak kekerasan dalam masyarakat	0 kasus	-	100.000	-	116.000	-	135.000	-	155.300	-	178.600	-	684.900		
	Terwujudnya peningkatan keamanan saat PilGub	Jumlah kasus tindak kekerasan dalam masyarakat		4. Pam PilGub Jateng tahun 2013	Jumlah kasus tindak kekerasan dalam masyarakat	-	-	-	-	-	-	550.000	-	-	-	-	-	550.000		
	Terwujudnya situasi aman pada saat PiLeg dan PiPres	Jumlah kasus tindak kekerasan dalam masyarakat		5. Pam PiLeg dan PiPres tahun 2014	Jumlah kasus tindak kekerasan dalam masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	1.998.073,8	-	-	-	1.998.073,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Terwujudnya situasi aman pada saat PilBup dan Wabup	Jumlah kasus tindak kekerasan dalam masyarakat		6. Pam PilBup dan Wabup	Jumlah kasus tindak kekerasan dalam masyarakat	0 kasus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.637.745	-	2.637.745	Kesbang Pol	Pbg
		Jumlah peserta pelatihan		7. Pelatihan pemadam kebakaran, SAR air dan SAR gunung	Jumlah peserta pelatihan	99,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
		Berfungsinya sistem peringatan dini		8. Pemantauan daerah rawan bencana dan kejadian bencana	Berfungsinya sistem peringatan dini	0 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
		Jumlah peserta pelatihan		9. Pelatihan Satlinmas Inti	Jumlah peserta pelatihan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			

An. KEPALA KANTOR KESBANG POL DAN LINMAS
KABUPATEN PURBALINGGA
KASUB. BAG. TU

EDY SETYAWAN, BA
Penata Tk. I
NIP. 19571214 198503 1 009

BAB VII. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Rencana strategis yang dijabarkan pada program dan kegiatan yang dilaksanakan pada visi dan misi organisasi yang nantinya dapat diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas bagi setiap aparatur di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.

Selanjutnya melalui Renstra ini diharapkan ada peningkatan kinerja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi semakin baik.

Kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis ini perlu dikaji sedemikian rupa agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana, kecuali apabila terjadi hal-hal yang berhubungan dengan perubahan sistem pemerintahan.

B. EVALUASI

Perlu dipahami bagi setiap aparatur di lingkungan kantor, bahwa rencana strategis ini menjadi acuan dan tolak ukur setiap kegiatan. Oleh karena itu, senantiasa akan dilakukan evaluasi intern dan ekstern dari tugas pokok kedalam program dan kegiatan seperti dalam Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.

C. TINDAK LANJUT

Dengan melihat kondisi strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, perlu dikaji ulang program dan kegiatan dalam Renstra ini.

Ketatapemerintahan yang baik dapat dicapai jika bisa menangkap nilai dan arti strategis fenomena yang berkembang dimasyarakat.

Semoga Renstra ini bermanfaat dan dapat dilaksanakan secara realistis sebagaimana mestinya.

Purbalingga, Februari 2010

**KEPALA KANTOR KESBANG POL DAN LINMAS
KABUPATEN PURBALINGGA**

SUPRIYANTO, S. Sos, M. Si

Pembina Tk. I

NIP. 19580820 198003 1 011

